

Journal of Accounting & Management Research

Corporate Governance and Shareholder Value of Indonesian Stock Exchange

Firms

Johny Budiman

The Effect of Leadership Behavior On Employee Performance With Organizational Commitment As Mediator

Muhammad Donal Mon

Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Linda Tan dan Robin

Analisis Pengaruh Kepemimpinan Otentik, Kreatifitas, Organisasi Pembelajaran dan Keterlibatan Kerja terhadap Inovasi dalam Organisasi

Fajar Try Prabowo dan Adi Neka Fatyandri

Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Budi Chandra dan Teddy Jurnal

Pengaruh Bauran Pemasaran dan Citra Merek terhadap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian di Kota Bandung

Andhi Sukma

Pengukuran VaR pada Portofolio dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R

Yayuk Setyaning Astutik

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja pada Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas se-Kota Batam

Roza Erda



Editor in Chief

Khomsiyah
(Universitas Trisakti Jakarta)

Managing Editors

Meiliana
(Universitas Internasional Batam)

Editorial Board

Evi Silvana Muchsinati
(Universitas Internasional Batam)

Handoko Karjantoro
(Universitas Internasional Batam)

R.A. Widyanti Diah Lestari
(Universitas Internasional Batam)

Hepy H. Ariyanto
(Universitas Internasional Batam)

Teddy Jurnal
(Universitas Internasional Batam)

Solimun
(Universitas Brawijaya Malang)

Sofyan Syafri Harahap
(Universitas Trisakti Jakarta)

Editorial Office

Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi-Batam, Indonesia
Telp. +62-778-7437111 (Hunting)
Fax. +62-778-7437112
e-mail: jamr@uib.edu



<i>Corporate Governance and Shareholder Value of Indonesian Stock Exchange Firms</i> Johny Budiman	<u>4</u>
<i>The Effect of Leadership Behavior On Employee Performance With Organizational Commitment As Mediator</i> Muhammad Donal Mon	<u>12</u>
Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Linda Tan dan Robin	<u>20</u>
Analisis Pengaruh Kepemimpinan Otentik, Kreatifitas, Organisasi Pembelajaran dan Keterlibatan Kerja terhadap Inovasi dalam Organisasi Fajar Try Prabowo dan Adi Neka Fatyandri	<u>29</u>
Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Budi Chandra dan Teddy Jurnal	<u>40</u>
Pengaruh Bauran Pemasaran dan Citra Merek terhadap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian di Kota Bandung Andhi Sukma	<u>51</u>
Pengukuran VaR pada Portofolio dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R Yayuk Setyaning Astutik	<u>61</u>
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja pada Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas se-Kota Batam Roza Erda	<u>69</u>

**ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Budi Chandra dan Teddy Jurnal
Fakultas Ekonomi
Universitas Internasional Batam**

ABSTRACT

This study aims to investigate the impact of good corporate governance and firm characteristics on corporate social responsibility disclosure in Indonesian Stock Exchange (BEI). The corporate governance variables used in this research are independent commissioner, individual ownership, government ownership, audit committee. Firm characteristic variables are firm size, profitability, margin of sales, liquidity, leverage, age of firm and audit firm size.

Samples from this study using the 211 non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2009-2013 and were selected using purposive sampling method. Panel data regression is used to examine the data. The results indicate that the individual ownership, government ownership, audit committee, firm size, profitability, age of firm and audit firm size has positive significant impact on corporate social responsibility disclosure.

Keywords: *Corporate Governance, Firm Characteristic and Corporate Social Responsibility Disclosure*

PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan yang signifikan dari kesadaran publik kepada peran sosial perusahaan. Banyak perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya telah menciptakan masalah sosial yang baru seperti polusi udara, sampah, perusakan sumber daya alam, kualitas dan keamanan dari produk, hak-hak dasar dari para pekerja, dan isu-isu etika. Di Indonesia tingkat pelaporan tanggung jawab sosial relatif rendah karena belum ada aturan baku yang menjadi acuan dalam pelaporan tanggung jawab sosial yang berakibat sulitnya pembaca laporan untuk melakukan kegiatan evaluasi dan analisis laporan (Utama, 2007). Oleh karena itu pemerintah menerbitkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial seperti UU (Undang-undang) No. 40 tahun 2007 mewajibkan perusahaan yang bidang usahanya terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, UU No. 25 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 68 yang mengharuskan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Tekanan dari publik memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab lebih luas tidak terbatas pada kelompok pemegang saham atau kreditur saja (Gray, Owen & Adam, 1987). Menurut Thomson dan Zakaria (2004) bahwa perusahaan yang gagal dalam memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan akan menyulitkan mereka secara sosial untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya. Semakin besar sebuah perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab sosial juga semakin besar dikarenakan perusahaan akan berusaha memperbaiki citra baik perusahaan walaupun dari kegiatan tersebut perusahaan akan cenderung menghabiskan biaya yang tidak kecil (Fraser, 2005).

Pada dasarnya, keputusan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial tersebut dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan (Akrouf dan Othman, 2013) karena salah satu tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Selain tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan seperti profitabilitas dan likuiditas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan tanggung jawab sosial karena kegiatan tanggung jawab sosial memerlukan pendanaan yang tidak sedikit.

Di Indonesia saat ini, pengungkapan tanggung jawab sosial masih bersifat sukarela dan relatif rendah. Masih banyak isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab sosial. Oleh karena itu penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan topik yang menarik untuk diteliti.

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu kepedulian organisasi dalam bisnis untuk melakukan kegiatan dengan cara bertindak sendiri dalam melayani kepentingan publik secara eksternal (Schermerhorn, 1993). Hackston dan Milne (1996) menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial adalah sebuah proses pengkomunikasian dari dampak sosial dan lingkungan yang berasal dari kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara luas. Menurut Daniri (2006) bahwa pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia sangat bergantung dengan pimpinan, artinya kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak selalu serasi dan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Jika pimpinan perusahaan memiliki moral yang tinggi, maka besar kemungkinan pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin tinggi, sebaliknya jika pimpinan berorientasi ke arah para pemilik saham seperti

produktivitas tinggi, saham tinggi, prestasi sendiri, bisa jadi pengungkapan tanggung jawab sosial hanya sekedar formalitas dengan manfaat rendah.

Citra perusahaan dapat dilihat dari informasi sosial yang diungkapkan ke publik, semakin banyak informasi tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, maka publik menilai perusahaan semakin peka dan bersahabat dengan sosial, tentu saja hal ini akan memberikan sinyal positif bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Untuk menciptakan dan menanam pentingnya kehidupan sosial, dibutuhkan tata kelola yang baik dari pihak perusahaan, karena segala kebijakan dan keputusan berkaitan dengan investasi sosial diputuskan oleh pimpinan. Semakin besar sebuah perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab sosial juga semakin besar dikarenakan perusahaan akan berusaha memperbaiki citra baik perusahaan walaupun dari kegiatan tersebut perusahaan akan cenderung menghabiskan biaya yang tidak kecil (Fraser, 2005).

Selain pimpinan, tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hubungan erat antara tata kelola dan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa adanya teori agensi (*agency theory*) yaitu hubungan yang muncul antara ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut, hal tersebut menciptakan kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pihak (*principal*) maupun pihak agen. Perbedaan kepentingan ini akan meningkatkan informasi asimetris yang memicu konflik agensi antara kedua pihak. Tata kelola seperti ini disebabkan para pucuk pimpinan (*agent*) memiliki informasi tentang perusahaan yang lebih banyak dibanding dengan para pemegang saham (*principal*). Perlu adanya tata kelola yang baik untuk meminimalisir konflik kepentingan dengan cara mengungkapkan semua informasi kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham termasuk informasi tentang tanggung jawab sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pengungkapan tanggung jawab sosial telah lama dilakukan penelitian oleh berbagai akademis dari seluruh dunia, penelitian dimulai dari tahun 1970-an. Penelitian telah banyak dilakukan untuk mendalami bagaimana pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial, namun kebanyakan penelitian hanya fokus di negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara-negara Eropa (Ernst & Ernst, 1978 dan Guthrie & Parker, 1990) dan belum banyak dilakukan pada negara sedang berkembang. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tanggung jawab sosial menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan individual, kepemilikan asing, direksi independen, dualitas CEO, ukuran perusahaan, efek pengungkit keuangan, tingkat pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan audit (Huangfang dan Jianguo, 2007), dan kepemilikan direksi (Ghazali, 2007).

Kegiatan tanggung jawab sosial membutuhkan dana yang tidak sedikit oleh karena itu kondisi perusahaan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kondisi kinerja keuangan yang baik akan turut mendorong untuk memberikan pengaruh kepada pihak pucuk manajemen untuk terus berkomitmen dalam menjalankan kegiatan sosial dimasa yang akan datang (Robert, 1992). Penelitian yang menggunakan variabel kinerja perusahaan yaitu efek pengungkit keuangan, profitabilitas dan ukuran perusahaan telah dilakukan oleh Roberts (1992), Alsaeed (2006) Jangu, Joseph dan Madi (2007), Khlif (2010), Khan (2010), Akhtaruddin dan Haron (2010), Mia dan Mamun (2011), Rahman, Zain dan Al-Haj (2011), Lucyanda dan Siagian (2012), Haji (2013), Naser dan Hassan (2013) dan Rusmanto, Waworuntu dan Syahbandiah (2014). Penelitian-penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh peneliti lain dengan menambahkan variabel *discretionary accrual* (Setyorini dan Ishak, 2012), kultur bisnis (Akroun dan Othman, 2013), tipe industri dan umur perusahaan (Alsaeed, 2006; Bayoud & Kavanagh, 2012), tingkat pertumbuhan perusahaan, (Huangfang dan Jianguo, 2007), kompleksitas perusahaan (Hossain dan Hammami, 2009) dan tingkat partisipasi perusahaan dalam media (Wang *et al.*, 2013).

Pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial akan dijelaskan selanjutnya dalam penelitian ini. Menurut Rosenstein dan Wyatt (1990) bahwa komisaris independen adalah alat untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku dari para manajemen, hal tersebut akan mendorong para manajemen untuk lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Pincus, Rusbarsky, dan Wong (1989) menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen diluar jajaran direksi akan menciptakan kualitas pengendalian dan pengawasan yang lebih baik karena mereka tidak berafiliasi terhadap perusahaan baik secara personal maupun pegawai sehingga keberadaan komisaris independen akan mewakili kepentingan pemegang saham, oleh karena itu semakin tinggi komisaris independen maka pengungkapan tanggung jawab sosial juga akan tinggi pula. Menurut penelitian sebelumnya, semakin besar proporsi dari komisaris independen akan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Cheng & Courtenay, 2006; Chen & Jaggi, 2000; Huangfang & Jianguo, 2007; Khan (2010); dan Rouf, 2011).

H1: Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Kepemilikan individual dipercayai akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Kepemilikan individual yang dimaksud adalah persentase kepemilikan oleh individu investor terhadap jumlah saham yang beredar. Menurut Fama dan Jensen (1983) bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan individual yang tinggi akan menyebabkan sumber konflik antara pemegang saham individual dan pihak manajemen perusahaan. Untuk mengurangi sumber konflik tersebut diperlukan pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan termasuk informasi sosial perusahaan. Putranto dan Raharja (2013) perusahaan yang memiliki kepemilikan individual yang besar cenderung memiliki pemangku kepentingan dengan jumlah yang lebih besar serta memiliki keragaman yang tinggi juga, untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi, dibutuhkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Teori agensi juga menjelaskan bahwa apabila kepemilikan individual besar, maka pengungkapan akan lebih tinggi (Haniffa dan Cooke, 2005).

H2. Kepemilikan individual berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Kepemilikan pemerintah adalah salah satu variabel yang sering digunakan dalam penelitian tata kelola perusahaan. Ghazali (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang dimiliki saham oleh pemerintah cenderung lebih sensitif terhadap tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat karena kepemilikan pemerintah secara tidak langsung merepresentasikan kepemilikan oleh rakyat. Jadi perusahaan didominasi oleh kepemilikan pemerintah maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial juga akan naik. Said *et al.* (2009), dan Haji (2013) membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah atas saham perusahaan akan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

H3: Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Ho dan Wong (2001) menjelaskan bahwa komite audit adalah sebuah proses tata kelola untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen sehingga manajemen dituntut untuk memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan dan turut meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Pendirian komite audit diyakini mampu menekan asimetris informasi, peluang manajemen dalam berbuat curang, dan meningkatkan kualitas dari pengungkapan. Semakin tinggi jumlah komite audit maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial juga semakin baik.

H4: Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan adalah variabel yang paling sering diteliti untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Naser & Hassan (2013) perusahaan yang besar diharapkan memiliki kekuatan finansial dan sumber daya manusia yang tinggi untuk melakukan analisis, penggabungan serta pengungkapan tanggung jawab sosial di laporan keuangan. Perusahaan yang besar juga digambarkan sebagai sebuah lambang keamanan kepada masyarakat, untuk menjaga dan mempertahankan rasa aman kepada masyarakat, perusahaan yang besar cenderung akan lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial. Menurut Akrouf dan Othman (2013) bahwa pada perusahaan yang besar terjadi biaya keagenan yang juga tinggi, untuk mengurangi biaya keagenan yang tinggi, perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk mengurangi kemungkinan biaya akan dikeluarkan akibat konflik antara pihak manajemen dan pihak pemangku kepentingan.

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Heinze (1976) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang membuat pihak manajemen memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk mengungkapkan kepada pemegang saham tentang program kegiatan sosial dan lingkungan yang lebih ekstensif. Perusahaan yang cenderung memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi akan dihadapkan pada tekanan sosial dan publik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keuntungan rendah (Holthaus & Leftwich, 1983). Oleh karena itu perusahaan tersebut harus menjelaskan kepada publik apa saja kegiatan bisnis dan aktivitas yang dilakukan untuk menjangkau ekspektasi publik terhadap perusahaan (Islam & Deegan, 2010).

H6: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Margin kontribusi merupakan rasio perbandingan antara laba bersih dibandingkan dengan penjualan bersih. Naser dan Hassan (2013) menekankan bahwa pada perusahaan yang memiliki tingkat margin kontribusi tinggi, mereka percaya bahwa laba yang tinggi adalah signal bahwa perusahaan dalam keadaan performa manajemen yang baik serta memberikan rasa aman kepada investor akan penanaman modal investor, sehingga tidak perlu mempromosikan diri dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial ke publik, sebaliknya perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah bahkan rugi cenderung akan berusaha menyakinkan para pemegang saham dan publik tentang masa depan perusahaan dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, Singhvi dan Desai (1971) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat margin kontribusi akan memotivasi pihak manajemen untuk menyuplai lebih banyak informasi untuk mengilustrasikan kemampuan manajemen untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Di sisi lain, keberhasilan perusahaan yang diukur dari keuntungan memberikan rasa bangga bagi pihak manajemen, hal tersebut memicu untuk melakukan pengungkapan informasi sosial yang lebih ke publik dan juga sebagai sarana promosi bagi perusahaan untuk menunjukkan kinerja manajemen. Sebaliknya pada perusahaan yang memiliki tingkat margin kontribusi rendah cenderung lebih merasa terancam dan berharap untuk mengaburkan kinerja buruk manajemen dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial yang sedikit (Richard, 1992).

H7: Margin kontribusi berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Cooke (1989) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat finansial yang kuat, yang diukur lebih spesifik dengan variabel likuiditas. Semakin tinggi tingkat likuiditas sebuah perusahaan, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya makin tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah.

H8: Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Efek pengungkit keuangan menentukan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Mia dan Mamun (2011) menyatakan bahwa pada perusahaan yang memiliki tingkat efek pengungkit keuangan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan dalam kondisi resiko kebangkrutan yang tinggi juga. Efek pengungkit keuangan yang tinggi membuat perusahaan dalam tekanan baik dari pihak bank maupun kreditor lainnya. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk memberikan respon positif ke pasar bahwa perusahaan tidak lagi dalam kondisi yang terdesak karena tingkat efek pengungkit yang tinggi itu. Menurut Huafang dan Jianguo (2007) perusahaan yang efek pengungkit keuangan tinggi akan berimbas pada peningkatan atas biaya pengawasan. Oleh karena itu, pihak manajemen pada perusahaan tersebut cenderung lebih aktif untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk mengurangi biaya pengawasan.

H9: Efek pengungkit keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Perusahaan yang jauh lebih tua atau lebih matang dalam hal usia, cenderung akan melakukan improvisasi terhadap cara pengungkapan tanggung jawab sosial dari waktu ke waktu jika dibandingkan dengan perusahaan yang jauh lebih muda dalam hal usia (Camfferman & Cooke, 2002). Owusu-Ansah (1998) menjelaskan bahwa umur perusahaan yang relatif muda akan mengalami kompetensi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih tua, jika perusahaan tetap mengungkapkan tanggung jawab sosial seperti pengeluaran penelitian, pengeluaran biaya pengembangan produk serta pengabdian terhadap masyarakat, hal ini justru akan menambah biaya operasional perusahaan yang berujung pada penurunan daya saing dengan perusahaan lama. Sehingga perusahaan kecil cenderung akan mengurangi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ke publik.

H10: Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan audit secara umum dibagi menjadi Big Four dan non Big Four. Perusahaan audit yang besar tersebar di seluruh dunia, sebaliknya perusahaan audit yang kecil biasanya hanya beroperasi secara domestik. Perusahaan audit yang besar cenderung lebih peka terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih jika dibanding dengan yang kecil, perusahaan audit yang besar memiliki reputasi yang cukup baik, sehingga dalam mencari klien perusahaan, cenderung lebih memilih perusahaan yang bersedia untuk mengungkapkannya.

H11: Ukuran perusahaan audit berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dasar, yaitu penelitian yang bertujuan untuk untuk mengembangkan dan mengevaluasi konsep-konsep teoritis (Indriantoro & Supomo, 2009). Ditinjau dari karakteristik masalah, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa (Indriantoro & Supomo, 2009).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan. Data tersebut berupa laporan tahunan perusahaan dan data nilai pasar yang terdaftar di BEI dengan periode 2009-2013. Data-data berupa laporan tahunan perusahaan diperoleh dari laman www.idx.co.id. Sampel yang terpilih harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang telah terbuka atau *go-public* yang terdaftar di BEI, tidak termasuk perusahaan dengan kategori finansial.
2. Perusahaan terbuka yang telah menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan secara berturut-turut selama 5 tahun yaitu dari tahun 2009-2013.
3. Perusahaan yang memiliki data atau informasi keuangan yang lengkap.

Operasionalisasi Variabel

1. Komisaris Independen

Menurut Rouf (2011) bahwa kekuatan dalam mekanisme tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah komisaris independen didalam sebuah perusahaan. Pengukuran variabel ini dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah persentase komisaris yang independen di dalam dewan direksi.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

2. Kepemilikan individual

Menurut Alsaed (2006), pengukuran variabel kepemilikan individual dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kepemilikan individual atas saham yang beredar di perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Individual} = \frac{\text{Jumlah Saham Individual}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

3. Kepemilikan pemerintah

Menurut Ghazali (2007) bahwa unsur kepemilikan pemerintah dalam sebuah perusahaan akan membawa dampak terhadap pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan, khususnya dalam hal memberikan dampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial. Naser et al. (2013) menjelaskan bahwa untuk mengukur kepemilikan pemerintah dilakukan dengan cara menghitung jumlah persentase kepemilikan saham pemerintah dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Kepemilikan Pemerintah}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

4. Komite audit

Menurut Rouf (2011), pengukuran variabel komite audit dapat dihitung dengan cara menggunakan variabel *dummy* dimana diberi nilai 1 jika terdapat dewan komite audit pada perusahaan dan diberi nilai 0 jika tidak terdapat dewan komite audit.

5. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian Rouf (2011) meneliti bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa pendekatan seperti tingkat perputaran penjualan dan total aset dalam perusahaan. Menurut Shubiri, Orabi dan Al-Abedallat (2012) ukuran perusahaan dapat diukur dengan mengambil nilai dari total aset pada perusahaan tersebut.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log}(\text{Total Aset})$$

6. Profitabilitas

Menurut Alsaeed (2006), pengukuran variabel profitabilitas dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kepemilikan individual atas saham yang beredar di perusahaan.

$$\text{Profitabilitas} = \text{Total Laba Bersih} / \text{Total Modal} \times 100\%$$

7. Margin Kontribusi

Wallace, Nassir dan Mora (1994) kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi, informasi tentang kinerja perusahaan sangat dibutuhkan oleh investor dalam hal pengambilan keputusan. Menurut Alsaeed (2006) rasio margin kontribusi dapat diukur dengan cara:

$$\text{Margin Kontribusi} = \text{Laba Bersih} \times 100\%$$

8. Likuiditas

Menurut Alsaeed (2006) likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Pengukuran likuiditas dapat dilakukan dengan :

$$\text{Likuiditas} = \text{Total Aset Lancar} / \text{Total Kewajiban Lancar} \times 100\%$$

9. Efek Pengungkit Keuangan

Rasio yang sering digunakan perusahaan untuk mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh kreditor adalah efek pengungkit keuangan. Menurut Gitman (2007), efek pengungkit keuangan adalah pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh hutang dari pihak ketiga. Penelitian Alsaeed (2006), pengukuran atas variabel efek pengungkit keuangan adalah:

$$\text{Efek Pengungkit Keuangan} = \text{Total Hutang} / \text{Total Aset} \times 100\%$$

10. Umur Perusahaan

Menurut Lucyanda dan Siagian (2012), umur perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam berkelangsung hidup di dunia bisnis. Ukuran umur perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan *log* dari total umur perusahaan (Alsaeed, 2006).

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Log}(\text{Tahun Observasi} - \text{Tahun Pendirian})$$

11. Ukuran Perusahaan Audit

Menurut Alsaeed (2006), pengukuran variabel ukuran perusahaan audit dapat dihitung dengan diberi nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four dan diberi nilai 0 apabila perusahaan diaudit oleh KAP non Big Four. KAP Big Four terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan KPMG (Alsaeed, 2006).

12. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penungkapan CSR. Variabel pengungkapan CSR ini diukur dengan proksi CSRDI (*corporate social responsibility disclosure index*) berdasarkan indikator ISO 26000.

$$\text{Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial} = \text{Total N ISO 26000} / 37 \text{ Item ISO 26000} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah Analisis Regresi Panel karena penelitian bermaksud menyelidiki hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen pada data *longitudinal* (gabungan antara *data cross sectional* dengan *data time series*). Aplikasi lunak yang akan digunakan adalah *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 21 dan program *Eviews 7*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang memenuhi syarat dari penelitian ini sebanyak 211 perusahaan dengan penelitian dengan jumlah data sebanyak 1.055 data. Hasil pengujian *outlier* terhadap dependen pengungkapan tanggung jawab sosial terdapat 57 data yang nilainya menyimpang dari nilai SDR tidak diikutsertakan dalam pengujian. Data yang diuji sebanyak 998 data.

Analisis Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	0,0270	0,7297	0,3019
Komisaris Independen	0,2000	0,8571	0,4086
Kepemilikan Individu	0,0000	0,8944	0,0250
Kepemilikan Pemerintah	0,0000	0,9003	0,0320
Ukuran Perusahaan	7,9515	14,3304	12,1879
Profitabilitas	-22,1643	215,0652	0,7475
Margin Kontribusi	-5,82E+10	4,85E+10	-2,29E+7
Likuiditas	0,0194	247,4441	3,2713
Efek Pengungkit	0,0039	6,4990	0,5575
Umur Perusahaan	8,5222	128,0000	33,5469

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki nilai rata-rata dari 30,19%. Hasil tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Malaysia yaitu sebesar 52,47% (Rahman, Zain & Al-Haj, 2011). Hal ini kemungkinan dikarenakan ketidakkonsistensian payung hukum tanggung jawab sosial di Indonesia (Daniri, 2006). Rata-rata jumlah komisaris independen perusahaan di BEI sebesar 40,86%. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI telah mengikuti pedoman BAPEPAM-LK bahwa Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki minimal empat anggota dewan (UU NO. 40 Tahun 2007) dan memiliki sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris adalah komisaris independen (Pedoman tentang Komisaris Independen, 2004). Rata-rata kepemilikan individual di perusahaan di BEI rata-rata sebesar 2,50%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan rata-rata perusahaan di Indonesia masih terkonsentrasi pada kalangan korporasi lokal, korporasi asing dan pemerintah. Rata-rata kepemilikan pemerintah sebesar 3,20% yaitu sekitar 20 perusahaan yang berstatus BUMN.

Hasil uji hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode regresi panel yaitu menggunakan data time series dan cross-section. Metode regresi panel menggunakan uji salah satu dari *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan teknik estimasi yang tepat disesuaikan dengan kondisi data. Untuk memilih model yang terbaik maka digunakan uji *Chow* dan uji *Hausman* sehingga model yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai.

Hasil penelitian uji *Chow* menunjukkan nilai signifikansi 0.0000 sehingga akan dilanjutkan uji *Hausman* untuk menentukan metode yang terbaik. Pengujian *Hausman* menunjukkan bahwa nilai dari *cross-section random* dengan nilai signifikansi 0,7389 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut di atas nilai 0,05, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *random effect*.

Nilai uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang berarti variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel pengungkapan tanggung jawab sosial.

Tabel 4.2
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t	Prob.	Hasil
Konstanta	-0.31319	0.00000	
Komisaris Independen	0.07532	0.00800	Signifikan
Kepemilikan Individu	0.10028	0.02670	Signifikan
Kepemilikan Pemerintah	0.33782	0.00000	Signifikan
Komite Audit	0.04297	0.04090	Signifikan
Ukuran Perusahaan	0.04752	0.00000	Signifikan
Profitabilitas	0.00162	0.00000	Signifikan
Margin Kontribusi	0.00000	0.51440	Tidak Signifikan
Likuiditas	0.00038	0.15460	Tidak Signifikan
Efek Pengungkit	-0.01327	0.06280	Tidak Signifikan
Umur Perusahaan	0.00085	0.00040	Signifikan
Ukuran Audit	0.02979	0.00020	Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen dalam perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini didukung oleh Rouf (2011) yang menyatakan bahwa kehadiran dari komisaris independen akan mengurangi asimetris informasi antara prinsipal dan agen dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk informasi sosial. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Haniffa dan Cooke (2005) yang menyatakan bahwa komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme yang mengawasi dan menyeimbangkan tata kelola perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial juga tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Eng dan Mak (2003), Huafang dan Jianguo (2007) dan Khan (2010), akan tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Barako, Hancock, dan IZAN (2006), Khodadadi, Khazami dan Aflatooni (2010), Ibrahim dan Samad (2011), Haji (2013) dan Rusmanto, Waworuntu dan Syahbandiah (2014).

Kepemilikan individual berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini didukung oleh Gelb (2000) yang menyatakan bahwa dengan tingkat kepemilikan individual tinggi akan menciptakan ketersediaan informasi investor yang lebih banyak, termasuk informasi sosial. Perusahaan cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih besar karena ingin mengeliminasi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Soliman, El-Din dan Sakr (2012), tetapi tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Roberts (1992), Wallace, Nasser dan Mora (1994), Alsaed (2006), Huafang dan Jianguo (2007), Said, Zainuddin dan Haron (2009), Gamerschlag (2011), Lucyanda dan Siagian (2012).

Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dalam Yen, Kian, Von, dan Keong (2012) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi maka menciptakan konflik kepentingan antara pihak manajemen dan masyarakat yang tinggi serta akan menimbulkan masalah moral sosial yang baru, sehingga dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih maka masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini juga

diperkuat oleh Said, Zainuddin, dan Haron (2009) yang menyatakan bahwa pemerintah selalu melakukan intervensi terhadap perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial karena pemerintah adalah simbol dari masyarakat sosial. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Ghazali (2007), Said, Zainuddin, dan Haron (2009), Haji (2013). Hasil penelitian tetapi tidak konsisten dengan penelitian oleh Huafang dan Jianguo (2007), Akroun dan Othman (2013) dan Naser dan Hassan (2013).

Komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh Barako, Hancock dan Izan (2006) yang menyatakan bahwa komite audit adalah sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja direksi, termasuk dalam mengawasi kegiatan sosial perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rouf (2011), Sweiti dan Attayah (2013), akan tetapi tidak konsisten dengan penelitian oleh Said, Zainuddin, dan Haron (2009), Akhtaruddin, Hossain, Hossain, Yao dan Lee (2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hackston dan Milne (1996) yang menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan termasuk kegiatan sosial perusahaan, juga semakin banyak pemegang saham yang mempunyai kepentingan agar perusahaan lebih aktif dalam kegiatan sosial. Ghazali (2007) juga menyatakan bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka tingkat popularitas di mata publik semakin tinggi, sehingga perusahaan cenderung lebih sensitif untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih banyak daripada perusahaan yang kecil. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mia dan Mamun (2011), Setyorini dan Ishak (2012), Galani, Gravas dan Stavropoulos (2011), akan tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Rouf (2011), Khelif (2010), Ebiringa, Yadirichukwu, Chigbu dan Ogochukwu (2013) serta Rusmanto, Waworuntu dan Syahbandiah (2014).

Margin kontribusi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Naser dan Hassan (2013) menekankan bahwa pada perusahaan yang memiliki tingkat margin kontribusi tinggi, mereka percaya bahwa laba yang tinggi adalah signal bahwa perusahaan dalam keadaan perfoma manajemen yang baik serta memberikan rasa aman kepada investor akan penanaman modal investor, sehingga tidak perlu mempromosikan diri dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial ke publik, sebaliknya perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah bahkan rugi cenderung akan berusaha menyakinkan para pemegang saham dan publik tentang masa depan perusahaan dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian konsisten dengan Belkaoui & Kahl (1987), dan Camfferman & Cooke (2002) namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Wallace, Naser dan Mora (1994) dan Alsaeed (2006).

Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Wallace, Naser dan Mora (1994), perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi tidak langsung mengarah kepada pengungkapan tanggung jawab sosial melainkan meningkatkan nilai perusahaan, peneliti tersebut juga menerangkan bahwa tingkat likuiditas yang rendah semakin membuat perusahaan berusaha untuk menutupi kelemahan perusahaan dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih banyak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Wallace, Naser dan Mora (1994), Alsaeed (2006) namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui & Kahl (1987) dan Camfferman & Cooke (2002).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efek pengungkit keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Belkaoui dan Karpik (1989) menekankan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat efek pengungkit keuangan yang tinggi cenderung akan mengalami pelanggaran atas kontrak kerjasama yang ada, sehingga pihak pucuk manajemen akan berusaha untuk melaporkan keuntungan bersih yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya termasuk pengurangan biaya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial. Uwuigbe dan Egbide (2012) juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat efek pengungkit keuangan yang tinggi tidak akan bersedia untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe & Egbide (2012) dan Akroun & Othman (2013), akan tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian oleh Alsaeed (2006), Rahman, Zain dan Al-Haj (2011), Shubiri, Orabi dan Al-Abedallat (2012) dan Rusmanto, Waworuntu dan Syahbandiah (2014).

Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini didukung oleh Owusu-Asnah (1998) yang menjelaskan bahwa ada tiga alasan yang menyebabkan umur perusahaan berpengaruh signifikan yakni (1) perusahaan yang lebih muda akan cenderung mengalami persaingan tidak adil apabila berusaha mengungkapkan tanggung jawab sosial seperti biaya penelitian dan pengembangan produk (2) biaya yang dikeluarkan untuk proses pengungkapan akan cenderung membebani perusahaan yang umurnya lebih muda (3) perusahaan yang muda cenderung memiliki jejak rekam yang sedikit sehingga hasil pengungkapan kurang optimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Roberts (1992), Hossain dan Hammami (2009), Soliman, El-Din dan Sakr (2012), Bayoud dan Kavanagh (2012), Soliman (2013), akan tetapi tidak konsisten dengan penelitian Alsaeed (2006), Sofian (2012), Lucyanda dan Siagian (2012) dan Wang, Song dan Yao (2013).

Ukuran perusahaan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang diaudit oleh perusahaan *Big Four* cenderung akan membuat berbagai laporan yang bervariasi termasuk laporan pengungkapan tanggung jawab sosial (Hossain dan Hammami 2009). Menurut Inchusti (1997) bahwa perusahaan yang ternama cenderung menghasilkan kualitas audit yang baik, sehingga mendorong perusahaan yang diaudit untuk mengungkapkan informasi yang lebih termasuk informasi sosial. Hasil penelitian ini konsisten penelitian Khodadadi, Khazami dan Aflatoon (2010), Khelif (2010) serta Uwuigbe dan Egbide (2012), tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian oleh Alsaeed (2006), Janggu, Joseph dan Madi (2007), Huafang dan Jianguo (2007), Akhtaruddin dan Haron (2010), Khasharmeh dan Desoky (2013), Soliman (2013) serta Naser dan Hassan (2013).

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Hasil penelitian tata kelola terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan individual, kepemilikan pemerintah dan komite audit berpengaruh signifikan positif. Hasil penelitian karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, namun margin kontribusi likuiditas dan efek pengungkapan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Keterbatasan Penelitian

1. Pengukuran variabel dependen pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menggunakan pengukuran ISO 26000 dilakukan secara subjektif, artinya peneliti memberikan nilai untuk masing-masing pengukuran sesuai dengan pemahaman peneliti, hal ini bisa mengakibatkan bias pemberian skor.
2. Belum banyak perusahaan yang melaporkan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui laporan keberlangsungan perusahaan sehingga pengumpulan data tidak maksimal.

Implikasi

Indonesia sebagai negara *emerging market*, dimana tingkat asimetris informasi antara investor dan manajemen masih dianggap tinggi. Hal ini disebabkan mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia yang kurang baik. Dengan adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan menjalin komunikasi yang efektif antara pihak manajemen dan pemegang saham yang mengurangi informasi asimetris. Mekanisme tata kelola yang baik seperti adanya pihak yang independen untuk menyeimbangkan dan mengawasi kinerja dari direksi/manajemen, adanya evaluasi dan suksesi kinerja pihak manajemen, serta senantiasa menjalankan setiap aktivitas dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Tata kelola yang baik akan meminimalisir konflik antara manajemen dan investor, sehingga terciptanya tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial yang pada akhirnya memberikan dampak secara langsung maupun tidak kepada keberlangsungan hidup sebuah perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia masih rendah dengan angka rata-rata 30,19%, artinya rata-rata perusahaan di Indonesia hanya mengungkapkan 30,19% dari jumlah poin pengungkapan tanggung jawab sosial menurut pengukuran ISO 26000, kegiatan sosial masih dinilai sebagai formalitas dengan manfaat yang rendah. Namun tata kelola komisaris independen di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Haniffa dan Cooke (2005) menjelaskan bahwa kehadiran komisaris independen pada sebuah perusahaan akan mendorong terjadinya keefektifan kinerja dari dewan komisaris dan direksi, sehingga mampu mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk informasi sosial. Patelli dan Principe (2007) menjelaskan bahwa komisaris independen sangatlah penting karena wawasan, pengalaman dan independensinya dalam pengawasan kinerja sehingga akan meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen. Kinerja positif dari komisaris independen tidak terlepas dari proses penyeleksian komisaris yang baik. Oleh karena itu, pemegang otoritas di Indonesia diharapkan mampu memperhatikan bagaimana seorang komisaris independen ditunjuk oleh perusahaan dengan membuat regulasi sehingga komisaris independen yang ditunjuk teruji independensinya serta selalu melakukan pengawasan. Cara tersebut dinilai akan menyeleksi komisaris independen yang teruji integritas dan independensinya yang pada akhirnya mampu mendorong kegiatan sosial perusahaan di Indonesia.

Kepemilikan pemerintah dalam sebuah perusahaan akan mendorong tata kelola yang baik, terutama pada kegiatan sosial perusahaan. Pemerintah sebagai simbol dari rakyat akan terus berusaha membangun citra peduli pada rakyat melalui kegiatan sosial, sehingga perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial. Pemerintah disarankan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial melalui penghargaan (*reward*), perlombaan pengungkapan tanggung jawab sosial (*award*) dan membuat regulasi yang mengatur standar baku pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial, yang berisikan bagaimana seharusnya pengungkapan tanggung jawab sosial dilaporkan di dalam laporan keuangan. Perusahaan di Indonesia yang ingin meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat melibatkan peran serta pemerintah dalam melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan pemerintah dapat dilakukan dengan kegiatan bisnis secara bersamaan atau mencari dana dari pemerintah untuk melakukan kegiatan sosial tertentu.

Peran tata kelola komite audit di Indonesia mampu memberikan pengawasan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Komite audit diyakini mampu menekan informasi asimetris, mengurangi peluang manajemen dalam berbuat curang, meningkatkan kualitas dari pengungkapan, serta menciptakan pengendalian internal yang jauh lebih baik. Semakin tinggi jumlah komite audit maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial juga semakin baik. Kinerja baik dari komite audit juga harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Otoritas Indonesia juga dapat memberikan panduan bagi perusahaan dengan membuat kebijakan seperti menciptakan indikator penilaian kinerja bagi komite audit untuk mengimplementasikan mekanisme insentif pada komite audit. Pihak perusahaan juga dapat memberikan kompensasi saham (*stock compensation*) bagi komite audit yang menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, hal ini dinilai penulis mampu meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih luas.

Mekanisme tata kelola kepemilikan individual memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Pemegang saham individual termasuk masyarakat umum tidak mendapatkan informasi yang lebih banyak jika

dibanding dengan pemegang saham mayoritas, institusi maupun asing, sehingga akan meningkatkan informasi asimetris. Hal tersebut akan memicu pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak termasuk informasi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Implikasi yang dapat disarankan kepada otoritas Indonesia dengan membuat regulasi yang mewajibkan batas minimal jumlah kepemilikan individual termasuk masyarakat umum pada perusahaan serta mempermudah individual atau masyarakat umum untuk memiliki saham pada perusahaan terbuka, yang pada akhirnya akan mendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan informasi sosial yang lebih sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sosial masyarakat.

Ukuran perusahaan dan umur perusahaan menjadi variabel yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin besar dan lamanya operasional suatu perusahaan cenderung memiliki kemampuan lebih baik dari segi finansial maupun pengalaman dalam menganalisis, mengumpulkan data, serta menjalankan kegiatan sosial. Perusahaan cenderung lebih fokus untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dan maju daripada mengungkapkan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang lebih kecil dan muda disarankan untuk melakukan pembelajaran dan pelatihan dari perusahaan yang lebih berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan sosial.

Profitabilitas adalah kata kunci yang sering digunakan oleh investor untuk menilai kinerja sebuah perusahaan, termasuk kinerja perusahaan dalam hal melakukan kegiatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu mengelola perusahaan dengan baik sehingga mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial yang diyakini bermanfaat bagi perusahaan. Namun bagi perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah bahkan merugi, tetapi tetap melakukan kegiatan sosial, otoritas regulasi di Indonesia juga dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan berupa insentif pajak serta menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang stabil bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga bisnis perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil untuk menopang kegiatan sosial.

Karakteristik terakhir dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan audit. Perusahaan audit yang besar diyakini mampu memberikan prosedur audit dan pengawasan internal yang lebih baik sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilakukan lebih luas. Perusahaan audit yang besar selalu menggunakan standar audit internasional dalam menjalankan proses pengauditan. Perusahaan yang ingin meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial disarankan untuk memilih perusahaan audit yang besar atau perusahaan audit ternama yang cenderung mengikuti prosedur internal dan standar pengendalian internasional sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial lebih tinggi. Otoritas regulasi di Indonesia juga disarankan untuk memberikan regulasi kepada perusahaan audit untuk melaksanakan kegiatan audit yang mengikuti standar internasional, sehingga membantu perusahaan untuk meningkatkan pengendalian internal yang baik yang akhirnya juga akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial secara tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtaruddin, M., & Haron, H. (2010). Board Ownership, Audit Committees' Effectiveness, and Corporate Voluntary Disclosures. *Asian Review of Accounting*, 18(3), 245-259.
- Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M., Yao, & Lee. (2009). Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *The Journal of Applied Management Accounting Research*, 7(1), 1-20.
- Akrout, M. M., & Othman, H. B. (2013). A Study of the Determinants of Corporate Environmental Disclosure in MENA Emerging Markets. *Journal of Reviews on Global Economics*, 2, 46-59.
- Alsaeed, K. (2006). The Association Between Firm-Specific Characteristics and Disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 476-496.
- BAPEPAM. (2000). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: SE-03/PM/2000*.
- BAPEPAM. (2004). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-29/PM/2004*.
- Barako, D. G., Hancock, P., & Izan, H. Y. (2006). Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies. *Corporate governance: An International Review*, 14, 107-125.
- Bayoud, N. S., Kavanagh, M., & Slaughter, G. (2012). Factors Influencing Levels of Corporate Social Responsibility Disclosure by Libyan Firms: A Mixed Study. *International Journal of Economics and Finance*, 4(4), 13-29.
- Belkaoui, A., & Kahl, A. (1987). Corporate Financial Disclosure in Canada, *Research Monograph No. 1 of Canadian Certified General Accountants Association, Vancouver*.
- Belkaoui, A., & Karpik, P. G. (1989). Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 2(1), 36-51.
- Camfferman, K., & Cooke, T. (2002). An Analysis of Disclosure in the Annual Reports of UK and Dutch Companies. *Journal of International Accounting*, 1(1), 1-28.
- Chen, C. J. P., & Jaggi, B. (2000). The Association between Independent Non-Executive Directors, Family Control and Financial Disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(4-5), 285-310.
- Cheng, E. C. M., & Courtenay, S. M. (2006). Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure. *The International Journal of Accounting*, 41(3), 262-289.
- Cooke, T. E. (1989). Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 1(2), 171-195.
- Daniri, A. (2006). Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia. Jakarta, *Ray Indonesia*.

- Ebiringa, O. T., Yadirichukwu, E., Chigbu, E. E., & Ogochukwu, O. J. (2013). Effect of Firm Size and Profitability on Corporate Social Disclosures: The Nigerian Oil and Gas Sector in Focus. *British Journal of Economics, Management & Trade*, 3(4), 563-574.
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325-345.
- Ernst & Ernst (1978). Social Responsibility Disclosure. 1978 Survey, *Ernst and Ernst, Cleveland, OH*.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law & Economics*, 25(2), 301-325.
- Fraser, B. W. (2005). Corporate Social Responsibility. *The Internal Auditor*, 62(1), 42-47.
- Galani, D., Gravas, E., & Stavropoulos, A. (2012). Company Characteristics and Environmental Policy. *Business Strategy and the Environment*, 21(4), 236-247.
- Gamerschlag, R., Moller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of Voluntary CSR Disclosure: Empirical Evidence from Germany. *Rev Manag Sci*, 5, 233-262.
- Gelb, D. S. (2000). Managerial Ownership and Accounting Disclosures: An Empirical Study. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 15, 169-85.
- Ghazali, N. A. M. (2007). Ownership Structure and Corporate Social Responsibility Disclosure: Some Malaysian Evidence. *Corporate Governance*, 3(7), 251-266.
- Gitman, L. J. (2007). Principios de Administración Financiera. 11th Ed, Mexico. Ed. *Pearson Education*, 694.
- Gray, R. H., Owen, D., & Adams, C. (1996). Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. *Hemel Hempstead, Prentice Hall*.
- Guthrie, J., & Parker, L. D. (1990). Corporate Social Disclosure Practice: A Comparative International Analysis. *Advances in Public Interest Accounting*, 3.
- Hackston, D., & Milne, M. J. (1996). Some Determinant of Social and Environment Disclosures in New Zealand Company. *Accounting, Audit, and Accountability Journal*, 9(1), 77-108.
- Haji, A. K. (2006). The Association Between Firm-Specific Characteristics and Disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 476-496.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abacus*, 38(3), 317-349.
- Heinze, D. C. (1976). Financial Correlates of A Social Involvement Measure. *Akron Business and Economic Review*, 7, 48-51.
- Ho, S. S. M., & Wong, K. S. (2001). A Study of Corporate Disclosure Practices and Effectiveness in Hong Kong. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 12(1), 75-101.
- Holthausen, R. W., & Leftwich, R. (1983). The Economic Consequences of Accounting Choice: Implications of Costly Contracting and Monitoring. *Journal of Accounting and Economics*, 5, 77-117.
- Hossain, M., & Hammami, H. (2009). Voluntary Disclosure in the Annual Reports of An Emerging Country: The Case of Qatar. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 25(2), 255-265.
- Huafang, X., & Jiangou, Y. (2007). Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 22(6), 604-619.
- Ibrahim, H., & Samad, F. A. (2011). Corporate Governance Mechanism and Performance of Public-Listed Family-Ownership in Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*, 3(1), 13-27.
- Inchausti, A. G. (1997). The Influence of Company Characteristics and Accounting Regulation on Information Disclosed by Spanish Firms. *European Accounting Review*, 6(1), 45-68.
- Islam, M. A., & Deegan, C. (2007). Motivations for An Organization Within A Developing Country to Report Social Responsibility Information. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 21(6), 850-874.
- Janggu, T., Joseph, C., & Madi, N. (2007). The Current State of Corporate Social Responsibility Among Industrial Companies in Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 3(3), 9-18.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Khan, M. H. U. Z. (2010). The Effect of Corporate Governance Elements on Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting. *International Journal of Law and Management*, 52(2), 82-109.
- Khasharmeh, H. A., & Desoky, A. M. (2013). On-line Corporate Social Responsibility Disclosures: The Case of the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. *Global Review of Accounting and Finance*, 4(2), 39-64.
- Khelif, H., & Souissi, M. (2010). The Determinants of Corporate Disclosure: A Meta-Analysis. *International Journal of Accounting and Information Management*, 18(3), 198-219.
- Khodadadi, V., Khazami, S., & Aflatooni, A. (2010). The Effect of Corporate Governance Structure on The Extent of Voluntary Disclosure in Iran. *Business Intelligence Journal*, 3(2), 151-164.
- Lucyanda, J., & Siagian, L. G. (2012). The Influence of Company Characteristics Toward Corporate Social Responsibility Disclosure. *Global issues in Business, Economics and Accounting*. Paper presented at The 2012 International Conference on Business and Management, September 6-7, 2012.
- Mia, P., & Mamum, A. A. (2011). Corporate Social Disclosure during The Global Financial Crisis. *International Journal of Economics and Finance*. 3(6), 174-187.
- Naser, K., & Hassan, Y. (2013). Determinants of Corporate Social Responsibility Reporting: Evidence from An Emerging Economy. *Journal of Contemporary Issues in Business Research*, 2(3), 56-74.
- Owusu-Ansah, S. (1998). The Impact of Corporate Attributes on the Extent of Mandatory Disclosure and Reporting by Listed Companies in Zimbabwe. *The International Journal of Accounting*, 33(5), 605-631.

- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tentang Komisaris Independen. (2004). Jakarta. *Komite Nasional Kebijakan Governance*.
- Pincus, K., Rusbarsky, M., & Wong, J. (1989). Voluntary Formation of Corporate Audit Committees among NASDAQ firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 8(4), 239–265.
- Putranto, R. J., & Raharja, S. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-12.
- Rahman, N. H. W. A., Zain, M. M., & Al-Haj, N. H. Y. AY. (2011). CSR Disclosures and Its Determinants: Evidence from Malaysian Government Link Companies. *Social Responsibility Journal*, 7(2), 181-201.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Richard, W. J. (1992), *The Impact Of Company-Specific Versus Country-Specific Characteristics On Financial Accounting Disclosure: An Empirical Study Of Thirteen Countries* (Doctoral Dissertation, The University of Mississippi).
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory. *Accounting Organizations and Society*, 17(6), 595-612.
- Rouf, M. A. (2011). The Corporate Social Responsibility Disclosure: A Study of Listed Companies in Bangladesh. *Business and Economics Research Journal*, 2(3), 19-32.
- Rosenstein, S., & Wyatt, J. G. (1990). Outside Directors, Board Independence and Shareholder Wealth. *Journal of Financial Economics*, 26, 175-191.
- Rusmanto, T., Waworuntu, S. R., & Syahbandiah, V. P. (2014). The Impact of Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Indonesia. *Handbook on the Emerging Trends in Scientific Research*, 377-385.
- Said, R., Zainuddin, Y. H., & Haron, H. (2009). The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212-226.
- Schermerhorn, J. R. (1993). *Management for Productivity* (4th ed.), Canada: *John Wiley & Sons, Inc.*
- Setyorini, C. T., & Ishak, Z. (2012). Corporate Social and Environmental Disclosure: A Positive Accounting Theory View Point. *International Journal of Business and Social Science*, 3(9), 152-164.
- Shubiri, F. N., Orabi, M. M. A., & Al-Abedallat, A. Z. (2012). Financial and Non-financial Determinants of Corporate Social Responsibility. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, 5(10).
- Singhvi, S. S., & Desai, H. B. (1971). An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure. *The Accounting Review*, 46(1), 129-138.
- Soliman, M. M. (2013). Firm Characteristics and The Extent of Voluntary Disclosure: The Case of Egypt. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(17), 71-80.
- Soliman, M. M., El-Din, M. B., & Sakr, A. (2012). Ownership Structure and Corporate Social Responsibility (CSR): An Empirical Study of the Listed Companies in Egypt. *The International Journal Social Science*. 5(1), 63-74.
- Sofian, M. A. (2012). The Influence of Company Characteristics Toward Corporate Social Responsibility Disclosure. *Global issues in Business, Economics and Accounting*. Paper presented at The 2012 International Conference on Business and Management, September 6-7, 2012.
- Sweiti, I. M., & Attayah, O. F. (2013). Critical Factors Influencing Voluntary Disclosure: The Palestine Exchange PEX. *Global Journal of Management and Business Research Finance*, 13(6), 8-15.
- Thompson, P., & Zakaria, Z. (2004). Corporate Social Responsibility Reporting in Malaysia Progress and Prospects. *Journal of Corporate Citizenship* 13 (Spring), 125-136.
- Utama, S. (2007). Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Pidato Ilmiah*. 14 November. Jakarta.
- Uwuigbe, U., & Egbide, B. C. (2012). Corporate Social Responsibility Disclosures in Nigeria: A Study of Listed Financial and Non-Financial Firms. *Journal of Management and Sustainability*. 2(1), 160-169.
- Wallace, R. S. O., Naser, K., & Mora, A. (1994). The Relationship Between the Comprehensiveness of Corporate Annual Reports and Firm Characteristic in Spain. *Accounting & Business Research*, 25(97), 41-53.
- Wang, J., Song, L., & Yao, S. (2013). The Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from China. *The Journal of Applied Business Research*, 29(6), 1833-1848.